

KONTRIBUSI JENDERAL BESAR A.H. NASUTION TERHADAP DWIFUNGSI ABRI (1958-1998)

Peza Pramana Putra¹, Herman², Safri Mardison³

^{1,2} UIN IB Padang; Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah-Kota Padang,
Sumatera Barat, (0751) 24435

^{3P} Prodi Tadris IPS Konsentrasi Sejarah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
e-mail: 1pezapramana87@gmail.com, 2herman@uinib.ac.id,
3safrimardison@uinib.ac.id

ABSTRAK

Jenderal Besar A.H. Nasution merupakan seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia kemiliteran seperti: memiliki karya dan pemikiran yang lebih spesifik didunia militer, menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), peletak dasar konsep-konsep kemiliteran, memformulasikan konsep dwifungsi ABRI, mengkritik pelaksanaan konsep Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru, kegunaan ABRI, dan profesionalitas ABRI. Maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut tentang Kontribusi Jenderal Besar A.H. Nasution Terhadap Dwifungsi ABRI (1958-1998). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitian ini: (1) Heuristik yaitu mengumpulkan sumber-sumber. Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku Memenuhi Panggilan Tugas Jilid I-IV karya Jenderal Besar A.H. Nasution sedangkan sumber sekunder penelitian ini adalah buku tentang Dwifungsi ABRI karangan orang lain. (2) Melakukan kritik sumber terhadap data yang ada dengan kritik internal dan eksternal. (3) Interpretasi yang merupakan analisa terhadap data dan menafsirkannya (4) Historiografi merupakan penulisan cerita sejarah dalam bentuk karya ilmiah. Hasil penelitian ini menghadirkan satu kajian sejarah tentang kontribusi Jenderal Besar A.H. Nasution terhadap Dwifungsi ABRI. Awalnya ABRI hanya berfungsi sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan. Setelah Jenderal Besar A.H. Nasution memformulasikan konsep Dwifungsi ABRI yang terkenal dengan sebutan jalan tengah. Jalan tengah yang dimaksud adalah ABRI tidak hanya sebagai alat belaka dari pemerintah yang dikuasai oleh politisi sipil dan ABRI juga tidak menguasai politik secara dominan. Pada akhirnya ABRI berfungsi sebagai kekuatan pertahan keamanan dan sosial politik yang terkenal dengan sebutan Dwifungsi ABRI.

Kata kunci: Kontribusi, Jenderal Besar A.H. Nasution, Dwifungsi ABRI.

Abstract

Great General A.H. Nasution is a very influential figure in the military world such as: having works and thoughts that are more specific in the military world, being the Army Chief of Staff (KSAD), laying the foundation for military concepts and formulating the concept of ABRI dual function, criticizing the implementation of the ABRI dual function concept in the past. The New Order, the work of the Armed Forces and the professionalism of the Armed Forces So the authors are interested in studying further about the Contribution of the Great General AH Nasution to the Dual Function of the Armed Forces (1958-1998). This research is library research using historical research methods. The steps of this research (1) Heuristics, namely collecting sources. The primary source in this research is the book Fulfilling the Call of Duty Volumes 1-IV by General Besar AH Nasution while the secondary source of this research is a book about the dual function of the Indonesian Armed Forces by other people (2) criticizes the sources on existing

data with internal and external criticism (3) Interpretation which is an analysis of the data and interpreting it (4) Historiography is the writing of historical stories in the form of scientific works. The results of this study present a historical study of the contribution of General AH Nasution to the Dwifungst ABRI. Initially, ABRI only functioned as a defense and security force. After the Great General AH Nasution formulated the ABRI dual function concept, which was known as the middle way. The middle way in question is that ABRI is not only a mere tool of the government which is controlled by civilians and ABRI is also not dominant in politics. In the end, ABRI functioned as a defense, security and socio-political force known as the ABRI Dual Function.

Keywords: Contribution, Great General A.H. Nasution, ABRI Dual Functions.

I. PENDAHULUAN

Sejarah kemiliteran di Indonesia memiliki proses yang berhubungan dengan masa kolonialisme Hindia Belanda. Militer lahir bersamaan dengan meletusnya revolusi rakyat untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah tercapainya kemerdekaan militer berjuang keras untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara seperti: perang, mediasi, politik dan lain-lain.

Harus diakui bahwa sejak proklamasi kemerdekaan konstelasi politik dan juga maraknya percaturan politik tidak terlepas dari faktor dan pengaruh keberadaan militer. Bahkan militer telah mengambil langkah-langkah yang sangat mendasar dan menepatkan dirinya sebagai tentara kemerdekaan. Ketika revolusi kemerdekaan usai, kemudian terjadi transformasi bentuk Negara pada tahun 1950, militer berdiri secara kuat dibelakang proses kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia (Supriyatmono, Hendri, 1994:1-2).

Perpolitikan Indonesia juga tidak lepas dari militer, sejak berdirinya bangsa ini militer telah terlibat dalam pengambilan kebijakan politik yang semestinya menjadi tanggungjawab sipil. Sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Salim Said “keterlibatan militer dalam politik sama tuanya dengan sejarah republik ini”.

Jenderal Besar A.H. Nasution telah berhasil untuk pertama kalinya menempatkan diri dalam pemerintahan dan juga berhasil memformulasikan konsep Dwifungsi ABRI hingga mendapatkan pengakuan dan dukungan dari pemerintah, bahkan militer telah bertindak sebagai salah satu kekuatan paling menentukan yang berdiri secara kuat dibelakang denkrit presiden 5 Juli 1959 yang kembali ke UUD 1945 (Amrin Imran et al., 1971:4).

Jenderal Besar A.H. Nasution merupakan seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia kemiliteran seperti: memiliki karya dan pemikiran yang lebih spesifik didunia militer, menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), peletak dasar konsep-konsep kemiliteran, memformulasikan konsep dwifungsi ABRI, mengkritik pelaksanaan konsep Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru, kekaryaan ABRI, dan profesionalitas ABRI. Bertolak dari uraian diatas maka kontribusi Jenderal Besar A.H. Nasution terhadap lahirnya Dwifungsi ABRI menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Dalam melakukan kajian ini tentu membutuhkan beberapa sumber rujukan dari penelitian terdahulu dengan mencari beberapa sumber referensi yang dapat digunakan untuk memperkuat kajian ini. Karena kajian ini bersifat kepustakaan (*Library Research*) maka kajian ini lebih difokuskan kepada pengumpulan data sekunder dengan memperbanyak sumber pustaka, yaitu dari hasil penelitian terdahulu, buku-buku, serta beberapa jurnal yang mengandung data tentang Kontribusi Jenderal Besar A.H. Nasution Terhadap Dwifungsi ABRI (1958-1998).

Rini Irawati mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial pernah meneliti tentang Peranan A.H. Nasution dalam peralihan kepemimpinan Orde Lama ke Orde Baru (1965-1998). Penelitian ini membahas tentang pemikiran politiknya A.H. Nasution dalam peralihan kepemimpinan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno kepada Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto (Rini Irawati, 2013).

Kornelis Rikan mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan pernah meneliti tentang Konsep Dwifungsi ABRI Dan Perannya Di Masa pemerintahan Orde Baru tahun 1965-1998. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep Dwifungsi atau ABRI yang memiliki dua peranan penting dalam militer pada masa pemerintahan Soeharto (Kornelis Rikan , 2014).

Nasution, Dwifungsi ABRI dan Kontribusi ke Arah Reformasi Politik. sebuah buku yang ditulis oleh Hendri Supriyatmono, yang didalamnya menjelaskan tentang Nasution dan perkembangan militer sampai dengan tahun 1955 serta memformulasikan konsep dwifungsi ABRI dan meletakkan landasan hukumnya.

Dari beberapa penelitian diatas belum ada yang mengkaji tentang Kontribusi Jenderal Besar A.H. Nasution Terhadap Dwifungsi ABRI (1958-1998). Maka dari itu penulis tertarik mengkajinya lebih lanjut untuk menambah wawasan seputar Dwifungsi ABRI dan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Adapun tahapan-tahapan dalam metode penelitian sejarah adalah sebagai berikut: (Amir Hamzah, 2020).

1. Heuristik

Heuristik adalah pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang berhubungan erat dengan objek penelitian. Pada tahap ini penulis harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber untuk dijadikan bahan-bahan penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku karangan Jenderal Besar A.H. Nasution “Bisikan Nurani Seorang Jenderal” dan “Memenuhi Panggilan Tugas Jilid

I-IV". Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku karangan Hendri Supriyatmono "Dwifungsi ABRI dan Kontribusi ke Arah Reformasi Politik", buku karangan Soebijono "Dwifungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia", buku karangan Selamat Ginting et al "ABRI dan Demokratisasi", buku keluaran Departemen Pertahanan Keamanan "Buku Petunjuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tentang Dwifungsi ABRI".

2. Kritik Sumber

Sumber terlebih dahulu harus dikritik melalui kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sumber tersebut telah diubah oleh orang tertentu atau tidak. Kritik eksternal dilakukan memverifikasi atau menguji terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Fungsi dari kritik eksternal ini adalah untuk memeriksa sumber sejarah demi menegakkan otentisitas dan integritas dari sumber tersebut.

Sementara kritik internal menekankan pada aspek dalam yaitu isi dari sumber. Kritik internal merupakan tindak lanjut dari kritik eksternal, dimana fakta data ditegakkan melalui kritik

eksternal, kemudian penulis melakukan evaluasi terhadap data tersebut. Apakah data itu dapat diandalkan atau tidak. Tujuan dari kritik sumber ini adalah untuk menyeleksi data sehingga diperoleh fakta.

3. Interpretasi

Interpretasi atau sintesis, adalah kegiatan untuk menafsirkan fakta-fakta juga menentukan makna dan saling berhubungan dengan fakta-fakta yang diperoleh. Dalam interpretasi diperlukan kecermatan dalam menghubungkan sebuah fakta dengan fakta yang lain untuk merangkai data yang relevan dengan kajian sehingga bisa dipercaya kebenarannya untuk dapat ditarik kesimpulan.

4. Historiografi

Historiografi merupakan penyampaian hasil rekonstruksi imajinatif daripada masa lampau yang sesuai dengan jejak-jejaknya kemudian dituangkan ke dalam sebuah karya tulis menjadi sebuah kisah sejarah. Oleh sebab itu, kemampuan dalam menulis sangat dibutuhkan, dalam arti kemahiran *art of writing* tidak boleh diabaikan. Pada tahapan ini, yang harus dituangkan dalam tulisan merupakan hasil dari penafsiran dari fakta-fakta itu menjadi sebuah kisah sejarah yang selaras (Een Herdiani, 2018:37-42).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Memformulasikan Konsep Dwifungsi ABRI

Sejak masa perang kemerdekaan, Jenderal Besar A.H. Nasution begitu tertarik dengan pemikiran Karl von Clausewitz, seorang jenderal perang yang sekaligus juga ahli strategi militer dari Prusia. Salah satu pemikiran Clausewitz yang cemerlang adalah analisisnya tentang perang yang selalu mengkaitkan aspek militer dengan aspek-aspek lain seperti aspek politik, sosial dan ekonomi. Gagasannya tentang perang disebutnya sebagai tritunggal yang menakjubkan. Politik pemerintah, kualitas profesional tentara dan sikap masyarakat, atau yang disebut tritunggal tadi, semuanya merupakan komponen yang memainkan peranan yang sama sepertinya.

Dalam pandangan Clausewitz, perang bukan semata-mata aktivitas militer dan hanya berdimensi militer, namun merupakan kelanjutan politik dengan cara lain. Oleh karena itu perang sebenarnya merupakan pula suatu tindakan politik. Dengan demikian politik dan militer hanya secara formal saja terpisah, namun dalam tingkat hakikat, masing-masing adalah ibarat sisi-sisi dari sebuah benda. Pandangan yang demikian itu ternyata tampak sangat menarik bagi Jenderal Besar A.H. Nasution, dan menjadi bagian

yang penting dari pengkajian-pengkajian yang pernah ia lakukan. Pandangan yang demikian bahkan boleh dibilang telah menjadi satu pegangan yang kuat dan penjabarannya yang bijak, ikut menjadi salah satu dasar dalam pemikiran Jenderal Besar A.H. Nasution mengenai format paling ideal posisi dan fungsi militer di Indonesia (Supriyatmono, Hendri, 1994:103). Namun demikian yang menjadi begitu menarik adalah bahwa Jenderal Besar A.H. Nasution sendiri juga memberikan suatu interpretasi dan pengembangan yang arif terhadap teori Clausewitz. Dalam sebuah memoarnya Jenderal Besar A.H. Nasution mengulas mengenai hal itu sebagai berikut:

“Dalam memperjuangkan posisi ABRI, saya punya argumentasi kuat berdasarkan sejarah perjuangan dan dengan melihat pola negara-negara Eropa Timur, dimana bukan pemisahan militer dan sipil yang ditonjolkan, akan tetapi adalah kebulatan partisipasi semua unsur masyarakat atau rakyat. Saya menafsirkan Clausewitz bukan sekedar realita tidak dapatnya saling dipisahkan, namun mestilah jelas dibedakan. Telah jadi pengalaman bagi saya bahwa sejak masa perang kemerdekaan, dimana teori Clausewitz adalah benar. Namun saya menolak tafsiran Barat yang mengutamakan

pemisahan. Saya cenderung kepada tafsiran Timur yang membedakannya saja, akan tetapi lebih mementingkan bahwa akhirnya strategi politik, militer, ekonomi, kultur haruslah berinduk pada politik besar, yang saya sebut dengan politik dengan huruf besar, bukan sekedar menurut *horizon politician*, tapi adalah menurut *horizon negarawan*” (Nasution, 1984:302).

Jenderal Besar A.H. Nasution mencoba menawarkan pandangannya, sebuah gambaran hubungan sipil-militer yang mengandung didalamnya sifat-sifat akomodatif dan kompromis. Orientasi yang terkandung didalamnya menunjukkan bahwa hubungan sipil-militer di Indonesia harus ditandai dengan suatu kerja sama yang erat dan harmonis antara keduanya. Baik politisi sipil maupun juga para perwira ABRI harus secara bersama-sama terlibat dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan-keputusan politik tingkat tinggi. Di sini Jenderal Besar A.H. Nasution dengan tegas menolak prinsip monopoli kekuasaan, dan dalam pengertiannya yang lain itu berarti pula suatu penolakan terhadap sistem demokrasi parlementer Barat yang tengah berlaku (Supriyatmono, Hendri, 1994:105).

Jenderal Besar A.H. Nasution kini mulai secara jelas membuka bagaimana kemauan

politik ABRI yang sebenarnya. ABRI tidak hanya menuntut diikutsertakan, melainkan keikutsertaannya secara permanen harus diakui dalam kabinet dan Dewan Nasional, namun juga diikutsertakan dalam DPR dan badan-badan kenegaraan lain baik bersifat eksekutif maupun legislatif.

Dengan demikian sebenarnya jelas bahwa sejak lama Jenderal Besar A.H. Nasution sama sekali tidak menginginkan suatu kedudukan dan peranan ABRI yang begitu saja dipisahkan dari politik atau yang secara luas berarti dipisahkan dari pemerintahan dan dari proses pengambilan keputusan politik. Suatu kebijaksanaan negara yang ideal haruslah pula memperhitungkan dengan cermat pertimbangan-pertimbangan ABRI, dan hal itu akan berarti harus dilibatkannya kelompok ABRI dalam setiap proses pengambilan keputusan-keputusan politik.

Situasi yang ada ketika itu memang masih dipenuhi ketidakpastian. Sampai bulan Oktober 1958, konsep Jenderal Besar A.H. Nasution belum mendapatkan respon yang diharapkan. Perdebatan yang cukup panas masih terjadi di Dewan Nasional, dan bahkan muncul lagi serangan-serangan partai politik terhadap berlakunya keadaan darurat perang. Suhu politik kemudian menjadi semakin panas dengan

berkembangnya kekhawatiran akan terjadinya sebuah kudeta ABRI (Yahya A Muhaimin, 1982:109).

Pada dies natalis Akademi Militer Nasional (AMN) yang pertama di Magelang tanggal 11 November 1958, Jenderal Besar A.H. Nasution memformulasikan konsep Dwifungsi ABRI yang terkenal dengan sebutan Jalan Tengah atau juga disebut sebagai the Armies' middle way. Konsep ini disebut Jalan Tengah karena ABRI tidak ingin hanya sebagai alat belaka dari pemerintah yang dikuasai oleh polisi sipil. Tapi Jenderal Besar A.H. Nasution juga tidak menginginkan peranan ABRI yang menguasai politik secara mutlak seperti yang ditunjukkan oleh banyak rezim militer di negara-negara lain (Indria Samego et al., 1997:46).

Dengan tegas Jenderal Besar A.H. Nasution menyatakan bahwa tentara Indonesia tidak akan mencontoh situasi seperti yang terdapat di beberapa negara Amerika Latin, dimana tentara bertindak sebagai satu kekuatan politik yang langsung. Tentara Indonesia dengan demikian tidak akan mengikuti cara-cara yang diambil tentara Amerika Latin yang telah memainkan peran politik secara langsung dengan mendominasi politik dan memonopoli kekuasaan. Akan tetapi, demikian ditegaskan, tentara Indonesia juga tidak akan meniru model Eropa Barat, dimana tentara hanya mengambil

peran pasif atau merupakan satu institusi yang pasif. Tentara Indonesia dengan demikian tidak ingin sekedar menjadi alat mati dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Pada prinsipnya, ABRI tidak akan melibatkan dirinya dalam pergolakan politik seperti kudeta. Namun ABRI pun tidak akan bertindak sekedar sebagai penonton dipinggir arena politik.

Jenderal Besar A.H. Nasution tampaknya sadar benar dengan kondisi yang demikian, dan memutuskan bahwa walau bagaimanapun ABRI harus tetap mempertimbangkan peta politik dan konstelasi kekuatan yang ada. Dalam pandangannya, yang paling tepat adalah bahwa ABRI lebih baik mengambil kompromi dari pada harus memaksakan keadaan, dan ia menganggap sekaranglah saat yang paling tepat untuk menawarkan konsepsi jalan tengahnya. Konsep Jenderal Besar A.H. Nasution ini, yang kemudian terkenal sebagai "Jalan Tengah Tentara", bukan saja membuka kemauan politik yang sebenarnya dari kelompok ABRI, namun juga telah membuka kesadaran berbagai kekuatan politik yang ada tentang kondisi real politics saat itu. Lebih jauh lagi, konsep ini haruslah dipandang sebagai bagian inti formulasi untuk pertama kalinya dari konsep Dwifungsi ABRI.

Dari kontribusi Jenderal Besar A.H. Nasution yang pertama ini dapat penulis tarik kesimpulan bahwa dalam

memformulasikan konsep Dwifungsi ABRI Jenderal Besar A.H. Nasution harus berjuang keras untuk mendapatkan dukungan dan mengerahkan seluruh pemikiran serta strategi politiknya supaya konsep Dwifungsi ABRI ini bisa diterima dan diakui oleh pemerintah. Berkat kegigihan, kepandaian, dan kejelian Jenderal Besar A.H. Nasution memahami situasi perpolitikan di Indonesia maka pada akhirnya konsep Dwifungsi ABRI dapat diterima dan diakui oleh pemerintah.

B. Meletakkan Landasan Hukum Dwifungsi ABRI

Sebagai bagian inti dari konsep Dwifungsi, pidato Jalan Tengah Tentara telah memberikan gambaran bagaimana bentuk paling ideal dari kedudukan dan peranan ABRI. Ketika rumusan itu kemudian mendapat dukungan, Jenderal Besar A.H. Nasution memutuskan untuk maju selangkah lagi ke arah segera diperolehnya legitimasi paling kuat bagi partisipasi politik ABRI, yang sesungguhnya tentu hanya dapat dimungkinkan dengan diperolehnya landasan konstitusional. Dalam pandangan Jenderal Besar A.H. Nasution, landasan semacam itu yang paling ideal dan paling mungkin adalah UUD 1945. Legitimasi konstitusional itu akan dimungkinkan oleh sifat kekeluargaan dari UUD 1945 (Indria Samego et al., 1997:118).

Namun terlepas dari anggapan yang demikian, fakta menunjukkan bahwa memang kemudian segera terjadi perkembangan yang begitu cepat dalam proses negosiasi di Dewan Nasional. Hanya berselang satu minggu setelah Jenderal Besar A.H. Nasution menyampaikan pidatonya, Dewan Nasional segera mengadakan sidang kembali yang berlangsung tanggal 19, 20, dan 21 November 1958. Dalam sidang inilah akhirnya dirumuskan golongan fungsional dan perincian golongan-golongan fungsional dalam masyarakat Indonesia. Perincian golongan fungsional ini telah membuat semakin jelas, dan pasti, status ABRI dalam pentas politik, yaitu sebagai bagian atau salah satu golongan fungsional. ABRI dikategorikan sebagai Golongan Fungsional Angkatan Bersenjata, yang terdiri Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Dengan memasukkan pula di dalamnya Organisasi Keamana Desa (OKD) dan Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR) (Supriyatmono, Hendri, 1994).

Golongan fungsional secara jelas dan pasti diletakkan dalam kerangka konstitusional UUD 1945. Kemudian didalamnya tercakup pula ABRI, dan bahkan status ini telah menjadi dasar yang tepat bagi partisipasi yang luas dari golongan ABRI dalam melakukan peranan-peranan non-militernya. Penempatan ABRI dalam institusi-institusi

kenegaraan bahkan juga telah disebutkan seperti yang diaman

Walaupun Dwifungsi ABRI sudah mempunyai landasan konstitusional yang cukup kuat seperti diuraikan di atas, namun Jenderal Besar A.H. Nasution masih menganggap perlu untuk mengaturnya secara eksplisit dalam suatu Undang-Undang dengan maksud agar landasan hukumnya menjadi lebih mantap. Baru pada tahun 1982 fungsi ABRI sebagai kekuatan Pertahanan Keamanan dan Sosial Politik diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 26 dan 28 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26: Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dan sebagai kekuatan sosial.

Pasal 28: 1) Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisor dan stabilisor yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Angkatan

Bersenjata diarahkan agar secara aktif mampu meningkatkan dan memperkokoh ketahanan nasional dengan ikut serta dalam mengambil keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan, mengembangkan demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tersebut maka landasan hukum Dwifungsi ABRI menjadi mantap dan lengkaplah landasan konstitusional dan landasan hukum bagi Dwifungsi ABRI, terutama fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik (Supriyatmono, Hendri, 1994:49-50).

Dapat penulis simpulkan bahwa kontribusi Jenderal Besar A.H. Nasution dalam meletakkan landasan hukum Dwifungsi ABRI begitu rumit, dan harus menyesuaikan dimana Dwifungsi ABRI cocok untuk disandarkan. Berkat kedewasaan berpolitik, Jenderal Besar A.H. Nasution mampu memasukkan Dwifungsi ABRI dalam golongan fungsional dan pada akhirnya dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 sebagai landasan hukum yang kuat bagi Dwifungsi ABRI.

C. Implementasi Dwifungsi ABRI

Implementasi Dwifungsi ABRI yang dimaksud adalah untuk membentuk profesionalisme dalam tubuh ABRI, dimana ABRI bukan hanya bertindak sebagai alat pertahanan keamanan negara saja melainkan juga harus mampu melakukan tugas serta peran lainnya di bidang non-hankam (Soebijono et al., 1992:5).

Namun pada proses pelaksanaannya, kebijakan Dwifungsi ini mengalami perluasan peran yang digunakan oleh Soeharto sebagai penguasa pada saat itu untuk ikut menompang kekuasaannya serta mengamankan kekuasaannya dari gangguan apapun, sehingga Soeharto berturut-turut terpilih menjadi Presiden kurang lebih 32 tahun lamanya. Perluasan peran ABRI ini menyebabkan dominasi ABRI dalam politik dan birokrasi pada masa pemerintahan Soeharto. Terjadinya dominasi ABRI dalam birokrasi adalah satu implikasi bentuk pemberlakuan kebijakan Dwifungsi ABRI yang berdampak pada kehidupan sosial politik di Indonesia.

Mantan Kepala Staf Teritorial ABRI, Agus Widjojo mengatakan bahwa implementasi dari Dwifungsi ABRI oleh Soeharto telah bergeser amat jauh dari konsep yang dibayangkan oleh Jenderal Besar A.H. Nasution. Awalnya, Dwifungsi digagas sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dan

sosial tetapi di bawah Soeharto, Dwifungsi menjadi alat pertahanan keamanan dan sosial politik yang dominan (Majalah Tempo, 2010:70).

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa implementasi konsep Dwifungsi ABRI pada masa Soeharto mengalami penyimpangan dengan apa yang dikonsepsikan oleh Jenderal Besar A.H. Nasution diawal. Pada masa Soeharto ABRI memiliki fungsi yang lebih dominan dalam kekuasaan.

D. Mengkritik implementasi Dwifungsi ABRI

Jenderal Besar A.H. Nasution mengkritik bahwa konsep Dwifungsi telah mengalami penyimpangan dari maksud semula. Ia berpendapat bahwa Dwifungsi ABRI sering diejek sebagai Dwiporsi, karena memang ada perbutan yang tidak tepat dari ABRI itu sendiri, terutama penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan. Mereka dijadikan alat kekuasaan oleh Presiden Soeharto yang mengakibatkan masyarakat kurang simpati kepada ABRI (Harold Crouch, 1999:45).

Lalu ketika Jenderal Besar A.H. Nasution telah pensiun dari ABRI serta tugasnya sebagai Ketua MPRS usai, kegiatan sehari-hari beliau banyak difokuskan kepada ceramah-ceramah, baik di masyarakat

umum sebagai mubaligh maupun di kampus-kampus sebagai tokoh yang ikut berperan penting dalam menegakkan Orde Baru. Ketika berceramah bahkan tidak jarang pula ada pertanyaan yang menjurus kearah meminta pertanggung jawaban atas Dwifungsi ABRI. Soalnya, Jenderal Besar A.H. Nasution dianggap konseptor Dwifungsi ABRI. Sampai-sampai ada penilaian bahwa ABRI yang difungsikan pada tugas-tugas non-hankam sekarang ini disebabkan oleh keberadaan konsep Dwifungsi ABRI.

Jenderal Besar A.H. Nasution selalu menjelaskan niat awal lahirnya konsep Dwifungsi ABRI, yang pada kenyataan berikutnya menjadi berbeda. Akan tetapi, banyak yang menganggap penyimpangan dalam pelaksanaan Dwifungsi ABRI penyebabnya adalah Jenderal Besar A.H. Nasution kerana ia merupakan konseptor dari Dwifungsi ABRI tersebut. Menanggapi hal ini, Jenderal Besar A.H. Nasution memberikan contoh yang sederhana. Jenderal Besar A.H. Nasution mengibaratkan sebuah rumah yang dibangun oleh orangtua untuk anak keturunannya dikemudian hari. Namun, ternyata ada diantara ahli warisnya yang menggunakan rumah tersebut untuk berjudi. Mana yang harus disalahkan, orang tua yang mewariskan rumah atau anaknya yang menyalahgunakan rumah itu (Tantang Sumarsono, 1997:97-99).

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa Dwifungsi ABRI yang dikonseptkan oleh Jenderal Besar A.H. Nasution diawal dulu niatnya berbeda dengan apa yang pada masa Orde Baru implementasikan. Maka harus dibedakan antara niat dan pelaksanaan.

IV. KESIMPULAN

Pada dies natalis Akademi Militer Nasional (AMN) yang pertama di Magelang tanggal 11 November 1958, Jenderal Besar A.H. Nasution memformulasikan konsep Dwifungsi ABRI yang terkenal dengan sebutan “jalan tengah” atau juga disebut sebagai the Armies’ middle way. Konsep ini disebut “jalan tengah” karena ABRI tidak ingin hanya sebagai alat belaka dari pemerintah yang dikuasai oleh politisi sipil. Tapi Jenderal Besar A.H. Nasution juga tidak menginginkan peranan ABRI yang menguasai politik secara mutlak seperti yang ditunjukkan oleh banyak rezim militer di negara-negara lain.

Untuk memantapkan kedudukan Dwifungsi ABRI maka Jenderal Besar A.H. Nasution mengusulkan bahwa ABRI dimasukkan sebagai golongan fungsional. Karena golongan fungsional sudah diletakkan dalam kerangka konstitusional UUD 1945. Status ini telah menjadi dasar yang tepat bagi partisipasi yang luas dari golongan ABRI dalam melakukan peranan-peranan non-militernya. Pada tahun 1982 landasan hukum Dwifungsi ABRI sebagai kekuatan

pertahanan keamanan dan sosial politik diatur dalam undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 26 dan 28.

Setelah landasan hukum Dwifungsi ABRI sudah jelas dan kuat maka ABRI sudah bebas melakukan fungsi non-militernya. Dalam implementasinya konsep Dwifungsi ABRI ini mengalami perluasan peran sehingga menyebabkan dominasi ABRI dalam politik dan birokrasi pada masa Orde Baru. Sehingga Jenderal Besar A.H. Nasution memberikan kritikan bahwa konsep Dwifungsi ABRI telah mengalami penyimpangan dari apa yang sudah ia konsepkan diawal dulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Crouch, Harold. 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dwi Istyaningrum, Febrinita. 2004. *Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik pada Masa Orde Baru (1965-1997)*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Hamzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Imran, Amrin, et al. 1971. *Sejarah Perkembangan Angkatan Darat*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI Departemen Pertahanan Keamanan.
- Irawati, Rini. 2013. *Peran A.H. Nasution dalam Peralihan Kepemimpinan Orde Lama ke Orde Baru*, Skripsi. Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lampo, Jumarni. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam Penanganan Tindakan Terorisme*, Skripsi. Makassar: Perpustakaan Universitas Hasanuddin.
- Majalah Tempo, “Bila Nama Tidak Terdengar”, *Majalah Tempo*, 17 (23 Mei 2010).
- Muhaimin, Yahya A. 1982. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, A.H, 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid IV Masa Pancaroba Kedua*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Rikan, Kornelis. 2014. *Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya di Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.
- Samego, Indria, et al. 1997. *Peran Sospol ABRI Masalah dan Prospeknya*. Jakarta: PPW-LIPI.
- Sumarsono, Tatang. 1997. *A.H. Nasution di Masa Orde Baru Lewat Kesaksian Tokoh Eksponen 66, Bakri Tianlean*. Bandung: Mizan.
- Supriyatmono, Hendri. 1994. *Dwifungsi ABRI Dan Kontribusi Ke Arah Reformasi Poitik*. Surakarta: Sebeas Maret University Press.